

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692996/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (692996) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 2.679.378.000 (DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.679.378.000
Rp. 2.679.378.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.679.378.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 2.679.378.000

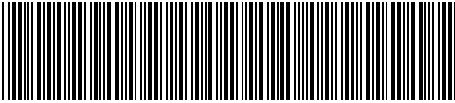
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4286-1882-1932-7406

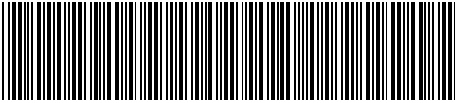
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692996) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.679.378.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.679.378.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	:	2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
	:	3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.940,00	Orang	2.503.448.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1190.00	Orang	1.260.622.000
	:	02 BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	600.00	Orang	1.182.826.000
	:	03 BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150.00	Orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk	3,00	Produk, Layanan	175.930.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.00	Layanan	175.930.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
I B. SUMBER DANA



DS:4286-1882-1932-7406

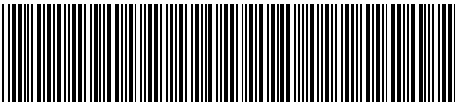
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692996) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.679.378.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	2.679.378.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4286-1882-1932-7406

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692996) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

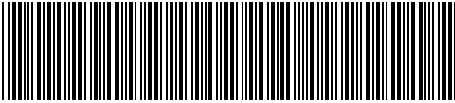
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692996	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	-	2.679.378	-	-	-	2.679.378	19 . 51	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.679.378	-	-	-	2.679.378		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.679.378	-	-	-	2.679.378		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	2.503.448	-	-	-	2.503.448		
04	PNBP	-	2.503.448	-	-	-	2.503.448	136@	
7121.BKB	Pemantauan produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	175.930	-	-	-	175.930	19 . 51	
04	PNBP	-	175.930	-	-	-	175.930	136@	
JUMLAH		-	2.679.378	-	-	-	2.679.378		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4286-1882-1932-7406

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692996) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

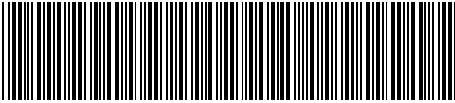
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692996	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	109.720	111.470	12.200	9.720	9.720	0	0	0	0	0	2.426.548	2.679.378
		BELANJA BARANG	0	109.720	111.470	12.200	9.720	9.720	0	0	0	0	0	2.426.548	2.679.378
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	109.720	111.470	12.200	9.720	9.720	0	0	0	0	0	2.426.548	2.679.378
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	109.720	111.470	12.200	9.720	9.720	0	0	0	0	0	2.426.548	2.679.378

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
IV A. B L O K I R



DS:4286-1882-1932-7406

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692996] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

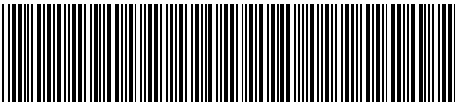
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692996	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.179.378	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 2.179.378	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.950
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 156.351		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 680.585
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	7121.BKB	Pemantauan produk
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.200	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.060
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.294	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.200
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.500	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.970
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.640	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.200
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 655.428		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692996/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4286-1882-1932-7406

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692996] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002